

BAB II

KETENTUAN HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNGSI

A. Ketentuan Umum Tentang Pengungsi

1. Pengertian Pengungsi

Suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu “Asylon” atau “Asylum” dalam bahasa Latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang dikejar-kejar mencari tempat berlindung¹. Masalah ini sama tuannya dengan sejarah kelahiran umat manusia atau dengan kata lain praktek permintaan dan pemberian suaka ini sudah lama sejak ratusan tahun yang lalu bahkan ribuan tahun yang lalu, jadi tidak hanya pada zaman sekarang tetapi pada zaman primitif pun suaka ini sudah dikenal dimana-mana. Kadang dikalangan suku primitif ada seseorang yang meninggalkan sukunya atau kampung halamannya untuk memohon pada suku lain²

Pengungsi adalah setiap orang yang mengalami rasa takut akan kemungkinan adanya penindasan/penyiksaan terhadap dirinya lantaran rasnya, agamanya, kebangsaannya atau keanggotaannya (afiliasinya) kepada kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya, di luar negaranya yang menaungi kebangsaannya, dan ia tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan dari negara itu lantaran rasa takut tersebut, atau setiap orang yang tidak memiliki kebangsaan dan berada di

¹ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pres, 2002, hlm. 42.

² *Ibid.*, hlm. 43.

luar negara tempat ia sebelumnya tinggal sehingga ia tidak mampu atau tidak ingin, lantaran rasa takut itu, untuk kembali kenegaranya³.

Dr.Kwan sik, SH, mengatakan suaka adalah perlindungan yang di berikan kepada individu oleh kekuasaan lain atau oleh kekuasaan dari negara lain(negara yang memberi suaka)

Oppenheim lauterpacht mengatakan bahwa suaka adalah dalam hubungan wewenang suatu negara mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperoleh seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya dan atas perlindungannya.

Prof.Dr. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bahwa suaka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik diwilayah sesuatu negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan Diplomatik dari sesuatu negara.

Dari batasan-batasan tersebut di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa iindividu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan prikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya⁴.

Seseorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari pesuaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses bepergian atau keberadaannya seseorang di luar

³ Ahmad Abou El_wafa, di terjemahkan oleh Asnawi, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, Jakarta: UNHCR, 2011, hlm. 13.

⁴ Sulaiman Hamid, *op.cit*, hlm. 46

negeri kewarganegaraannya atau tempat tinggal biasanya yang terdahulu. Seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya demikian oleh instrumen internasional dan/atau nasional⁵.

Suaka terbagi menjadi dua yaitu Teritori Asylum dan Diplomatic Asylum,

- a. Teritori Asylum (suaka wilayah) bahwa si individu yang memohon suaka adalah keluar dari negara asalnya dan memasuki wilayah negara lain untuk memohon perlindungan agar kepada dirinya tidak dikenakan yurisdiksi dari negara asalnya. Berarti bahwa suaka wilayah atau suaka teritorial menyangkut kepada kewenangan negara untuk memperbolehkan pengungsi atau aktivis politik masuk atau tinggal dibawah negara tersebut yang juga berarti di bawah perlindungannya karena itu, memberikan suaka kepadanya.
- b. Diplomatik Asylum (suaka diplomatik) adalah suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan yang berada di wilayah negara pemohon sehingga terhadap si pemohon tidak usah dikenakan yurisdiksi negara setempat (negara asalnya)

Dalam hukum internasional seseorang memperoleh status pengungsi, diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

- a. Orang tersebut berada di luar negara yang menjadi identitas kebangsaannya atau di luar negara yang biasa didiaminya apabila ia berstatus tidak punya kewarganegaraan
- b. Adanya kekhawatiran atas timbulnya faktor yang membenarkannya untuk mengalami penganiayaan, lantaran rasnya, agamanya, kebangsaannya atau afiliasinya kepada kelompok sosial tertentu atau lantaran pandangan politiknya
- c. Pengungsi tidak mampu atau tidak ingin berada dalam perlindungan negara asalnya atau negara yang biasa didiaminya atau apabila ia berstatus tidak punya kewarganegaraan dari negara asalnya atau negara yang biasa didiaminya⁶.

Yang tidak diperbolehkan memohon suaka adalah mereka yang diduga keras telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap manusia⁷

Prinsip *non-refoulement*, sebagaimana tercantum pada Pasal 33 Konvensi tahun 1951 merupakan dasar dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Substansi dari prinsip *non-efoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya, dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam⁸.

⁶ Ahmed Abou El-Wafa, *op.cit.* hlm. 25.

⁷ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar grafika, 2012, hlm. 117

⁸ *ibid.*, 118.

Dalam pasal 31 Konvensi 1951 tentang status pengungsi yang intinya, negara-negara pihak tidak akan menjatuhkan hukuman, atas alasan masuknya atau beradanya pengungsi secara ilegal, kepada pengungsi yang datang secara langsung dari wilayah dimana hidup atau kebebasan mereka terancam. Hal demikian mengandung makna bahwa tidak dijatuhkannya hukuman lantaran masuknya atau beradanya pengungsi dalam suatu wilayah negara secara ilegal⁹.

Dalam hukum pengungsi internasional termaktub pada pasal 18 yaitu adanya hak bekerja bagi pengungsi yang menyatakan:

“negara-negara yang mengadakan perjanjian akan memberikan kepada pengungsi yang secara sah di wilayahnya perlakuan yang selayak mungkin, dan bagaimana juga tidak kurang dari apa yang diberikan oleh orang-orang asing pada umumnya dalam keadaan yang sama, yang berkenaan dengan hak bekerja untuk kepentingannya sendiri dala bidang-bidang pertanian, industri, kerajinann tangan dan perdagangan serta mendirikan perusahaan-perusahaan dagang dan industri”¹⁰.

2. Hukum Pengungsi di Indonesia

Secara geografis letak Indonesia sangat strategis sebagai negara transit bagi para pengungsi lintas batas negara. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki pelabuhan kapal laut serat berbatasan dengan negara lain, terutama berbatasan Kalimantan barat dengan sabah Malaysia, Australia di bagian selatan, juga bagian timur dengan negara Timor Leste. Terdapat 79 pintu perbatasan legal yang terdapat di Indonesia di luar jalur-jalur tikus¹¹.

⁹ Ahmed Abou El-Wafa, *op.cit.* hlm. 53.

¹⁰ Sulaiman Hamid, *op.cit.* hlm. 146

¹¹ Wagiman, *op.cit.* hlm. 165.

Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, konsep status pengungsi telah mengalami perubahan yang substansial, baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Pada hukum internasional pada dasarnya pengungsi adalah orang-orang yang dikelompokkan ke dalam masyarakat yang tidak bisa dikenakan tanggung jawab hukum internasional. Mereka melarikan diri dari negerinya dan menjadi pengungsi disebabkan karena adanya bencana kemanusiaan, seperti peperangan, kejahatan berat melanggar kemanusiaan dalam sistem pemerintahan dikator, dan kejahatan peperangan¹².

Indonesia terkait dengan suaka telah ditegaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28G ayat (2) menyatakan:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” adanya rumusan tentang hak suaka dijamin secara konstitusional¹³.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar

Negeri, pada Pasal 25, 26 dan 27 menyebutkan:

Pasal 25: “kewenangan memberikan suaka kepada orang asing berada ditangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri”

Pasal 26: “pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek internasional”

Pasal 27: “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri”¹⁴

¹² Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002, hlm. 136.

¹³ Wagiman, *op.cit*, hlm. 130.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

Undang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, terkait masalah pengungsi, disebutkan pada Pasal 28, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa¹⁵.

Ketentuan Rumah Detensi Imigrasi pada Pasal 2 menyebutkan:

penempatan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi(Rudenim) dalam hal yang bersangkutan:

- a. Berada di wilayah negara republik Indonesia tanpa memiliki izin yang sah
- b. Menunggu proses pemulangan atau deportasi.

Pada pasal tujuh menyebutkan tentang kebutuhan pengungsi, yaitu:

Perawatan Deteni meliputi penyediaan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan dan pembinaan rohani¹⁶.

Dalam aturan Dirjen Imigrasi Pasal 3 menyebutkan:

Imigran ilegal tidak dapat dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal:

- (1) Telah memperoleh surat keterangan dari UNHCR
- (2) Berstatus pengungsi dari UNHCR

Pada surat pernyataan pengungsi pada Nomor 4 adanya larangan untuk bekerja, yang menyatakan:

“Pengungsi harus taat kepada peraturan yang berada di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapat upah, mengendarai tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM)¹⁷.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pdf.

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.06.II_02.01. Tahun 2006, Pdf.

¹⁷ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010. Pdf.

B. Ketentuan Pengungsi dalam Hukum Islam

Di dalam bahasa Arab, kata *al-malja'* memiliki lebih dari satu arti. Di antaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti “berlindung” seperti dalam ungkapan: “seseorang berlindung di benteng itu” maksudnya, ia berlindung dari hal yang membahayakan dengan tinggal/berada di dalam benteng itu. Sedangkan *al-malja'* sebagai kata benda adalah tempat atau obyek yang dijadikan untuk berlindung dari hal membahayakan, seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti ini muncul pada Q.s al-taubah[9]:57 dan, Q.s. al-syura[42]:47,

لَوْ تَحَدُّونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَاتٍ أَوْ مَدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.*⁵⁷

أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّלَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكَيرٍ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu).*⁴⁷.

Di dalam pokok bahasan *masdar* (kata benda), terdapat lebih dari satu bentuk *masdar* dari asal satu kerja. Ibn Qutaibah mengatakan: *awaitu lahu*

ma'wiyah wa 'iyah, yang berarti *menyayangi*, serta *awaitu ila bani fulan awan auyan*; dan *awaitu fulan-an iwa-an*, yang berarti *melindungi*.

Tak diragukan lagi, semua arti tersebut dapat diterapkan dalam hal pencarian dan pemberian suaka atas dasar pertimbangan bahwa sekiranya yang tampak itu makna “melindungi” maka makna intinya perluasan dari makna “menyayangi” pengungsi, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Perlu dicatat bahwa bangsa Arab menggunakan kata “*awaituhu*” (saya memberikan suaka kepadanya) dengan polah kata kerja *fa'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) dan *af'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) untuk makna yang sama, tetapi terkadang mereka menggunakan ungkapan “*awaitu ila fulan*” (aku memberikan perlindungan kepada seseorang)¹⁸.

Supaya pemberian suaka sesuai dengan Syari'at Islam, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Pencari suaka harus berada di negara islam atau tuduk di wilayah negara Islam, sebutan negara Islam mencakup wilayah-wilayah dimana Syari'at Islam diterapkan dan orang-orang yang menghuninya baik Muslim atau non-Muslim¹⁹. Dalam Al-qur'an memang tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat islam untuk mendirikan negara, lebih dari itu bahkan istilah negara(*daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-qur'an. Tetapi, unsur-unsur dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat ditemukan di dalam kitab

¹⁸ Ahmad Abou El_wafa, *op.cit*, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

suci, prinsip-prinsip pokok yang di maksud itu antara lain adalah musyawarah(Q.S3:159), keadilan(Q.S4:58), persamaan(Q.S.49:13), patuh pada pemimpin(Q.S.4:59) dan lain-lain²⁰

Islam. Menurut Muhamad Husein Haikal, tidak pernah menentukan sistem dan bentuk negara yang baku yang harus diikuti oleh umat Islam di segala tempat dan di sepanjang zaman. Islam, hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan sistem pemerintah yang berkembang sepanjang sejarah. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud itu antara lain adalah persamaan, *syura*(musyawarah), persaudaraan dan kebebasan²¹.

2. Terdapat motif untuk memperoleh suaka dan dalam pandangan Islam, semua motif itu adalah setara. Disyaratkan adanya motif memperoleh suaka, namun tidak disyaratkan si pencari suaka itu hanya lari ke negara Islam lantaran takut terhadap penganiayaan yang akan menimpanya. Lebih dari itu, suaka dapat di berikan kepada setiap orang yang ingin tinggal di negara Islam, baik dengan alasan ia telah memeluk agama Islam ataupun alasan ia ingin tetap menjadi warga negara dengan status *ahl al-dzimmah*(non-muslim dibawah perlindungan negara Islam)
3. Ketidakinginan atau ketidakmungkinan pencari suaka memperoleh perlindungan dari negara asalnya

²⁰ Mular Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas non-muslim dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa, 2003, hlm. 11.

²¹ *Ibid.*, hlm. 23.

4. Ketiadaan pertentangan antara pemberian suaka dengan prinsip-prinsip dan ajaran syari'at islam²²

Islam melarang tindakan pemulangan atau pengembalian pengungsi ke suatu wilayah atau daerah dimana merasa takut kebebasan dan hak-hak dasar lain yang dimilikinya terancam (seperti menjadi korban kekerasan, penindasan,/penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau lainnya). Bahkan dikatakan bahwa Islam adalah yang pertama kali yang mengakui asas larangan pemulangan, dan asas larangan ekstradisi bagi mereka yang melakukan kejahatan politik.

Islam mempunyai aturan yang mana pengungsi tidak boleh diperlakukan sebagaimana berikut:

- a. Asas larangan pemulangan ini atau *non refoulement* dianggap sebagai asas yang bersumber dari hukum kebiasaan atau *urf*(dalam tata pergaulan kebiasaan bangsa) dan dala *qawa'id fiqiyah* (kaidah syari'at Islam) bahwa sesuatu yang diakui oleh kebiasaan adalah setara dengan aturan atau sesuatu yang diperjanjikan.
- b. Asas ini telah diterapkan sejak priode awal negara Islam Madinah di bawah pada masa kepemimpinan Nabi SAW dan yang telah beliau akui legalitasnya, sehingga asas ini berlaku bagi pengungsi.
- c. Larangan pengusiran pengungsi atau pencari suaka ke daerah dimana dikhawatirkan akan terjadi tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap

²² Ahmed Abou El-wafa, *op.cit*, hlm. 19-22.

bertentangan dengan asas/prinsip Islam yang dikenal dengan “asas larangan mencederai jaminan perlindungan”

- d. Pemulangan pengungsi ke negara dimana ia khawatir akan terancam jiwanya atau terlanggar hak-hak asasinya dinilai sebagai tindakan penghianatan dan menurut Syari’at Islam , penghianatan hukumnya haram, hal ini berlaku baik bagi pengungsi itu orang muslim maupun orang yang berpindah ke Islam²³.

Terdapat beberapa golongan yang tidak berhak mendapatkan suaka karena memang mereka layak untuk itu. Jelaslah bahwa ketentuan ketiga yang disebutkan dalam pasal 1 Konvensi 1951 mengenai status pengungsi belum dikenal pada masa awal sejarah Islam dikarenakan PBB baru didirikan pada tahun 1945, yakni 14 abad setelah kemunculan Islam. Akan tetapi, karena negara-negara Islam adalah juga anggota PBB dan oleh karenanya mereka secara otomatis menjadi negara pihak dari piagam yang melahirkan organisasi dunia itu, ketentuan ini berlaku pula bagi negara-negara Islam dan wajib diterapkan oleh mereka.

Dalam Islam terdapat beberapa aturan yang memang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan memberikan Suaka kepada pelaku kejahatan non-politik.

Larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang merupakan pelaku tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan yang diancam dengan sanksi

²³ *Ibid.*, hlm. 29.

pidana *hadd* (sanksi hukum yang sudah baku dalam Al-qur'an dan Hadits) seperti pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang benar.

- b. Larangan memberikan suaka kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perjanjian internasional. Apabila terdapat perjanjian yang melanggar negara Islam memberikan hak suaka kepada golongan individu tertentu, dan perjanjian itu tidak bertentangan dengan sumber dan dalil Syari'at Islam maka negara Islam maka wajib mematuhi peraturan tersebut.
- c. Larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang terlibat tindakan kejahatan serius di negara asalnya.

Tujuan utama dari pemberian suaka ialah melindungi dari penganiayaan yang mungkin menimpanya bila ia harus tinggal di negara asalnya atau di tempat lain. Oleh karena itu seorang pengungsi seharusnya tidak boleh terlibat tindakan kejahatan serius, lalu ia mencari suaka untuk bebas dari hukuman.²⁴

Dalam Islam, pengungsi mendapatkan status hukum, yakni tidak kurang dari yang ditetapkan dalam hukum internasional. Bahkan, Islam tidak membolehkan pelanggaran hak-hak pengungsi atau pencari suaka lantaran berbeda agama. Pada surat Mumtahanah ayat 8-9 menjelaskan:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ

²⁴ *Ibid.*, hlm. 191-197.

الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن
تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim²⁵

Yang mana di dalam hukum internasional yang memberikan beberapa hak kepada pengungsi, diantaranya hak tidak dipulangkan pasal 33 dan hak bekerja pasal 18²⁶.

Ayat yang melembagakan suaka dalam hukum Islam tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 6 yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat

²⁵ Ibid., Hlm. 147.

²⁶ Wagiman, *op.cit*, hlm. 240 dan 233.

mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui²⁷

C. Hak-hak Pengungsi dalam Hukum Islam

Syari'at Islam sejak awal telah memperkenalkan asas persamaan antara anggota masyarakat. Syari'at Islam tidak mengenal adanya perbedaan dan pembatasan hak-hak antara warga negara. Setiap orang dianggap sama, begitu juga setiap golongan dan bangsa. Islam tidak mengenal warna kulit, berkulit putih ataupun berkulit kuning. Hal ini ditegaskan Al-Qur'an, perisa surat Al-hujurat ayat 13.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*

²⁷ Ahmed Abou El-wafa, *op.cit*, hlm. 82.

Sabda Nabi saw :

الْأَنَاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَنَّانِ الْمَشْطِ الْوَاحِدِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

Artinya: *Manusia itu sama seperti layaknya sisir, tidak ada keutamaan bagi orang arab atas orang ajam, kecuali dengan taqwanya*

Islam memandang manusia itu sama, baik baik menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab. Perbedaan derajat manusia menurut Islam diukur dari ketaqwaan seseorang. Syari'at Islam memperlakukan asas kesamaan dalam penerapan hukum dan Undang-Undang. Tidak ada yang bebas dari hukum atau mendapat perkecualian²⁸.

Al-khathib As-syirbini menyatakan bahwa akad *amân* bisa berlaku meski tidak sedang dalam perang, dengan tujuan untuk kemaslahatan dan dan menghindari genjatan senjata dengan orang-orang kafir²⁹.

Didalam negara Islam status warga negara terdiri dari dua golongan, yaitu golongan muslim dan golongan non-muslim, golongan non-muslim terdiri dari dzimmi dan musta'min³⁰ Musta'min adalah orang non-muslim yang mencari perlindungan di negara Islam untuk sementara waktu, dan mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya negara Islam melindungi dzimmi. Dzimmi mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya orang muslim

²⁸ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: Pestaka Rizki Putra, 2001, hlm.46-47.

²⁹ Syamsudin As-syirbini, *mughni muhtaj juz 6*, Dar Al-kitab Al-ilmiyah, hlm. 51.

³⁰ Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 63.

dalam hal kenegaraan, yaitu hak memperoleh perlindungan dari negara Islam dan masyarakat Islam yang meliputi perlindungan dari setiap musuh³¹

1. Hak Hidup

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, manusia adalah ciptaan Allah. Pada Al-Qur'an surat An-naml ayat 88 menuturkan:

صَنَّ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuhnya) seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhnya³².

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan:

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, diterjemahkan oleh Irfani Maulana Hakim, Bandung: Mizan Media Utama, 2010, hlm. 751-752.

³² Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy *op.cit*, hlm. 22.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزْهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (رَوَاهُ بُخَارِي)

Rasulullah bersabda: *tolonglah saudaramu yang menganiay (zalim) atau yang teraniaya (terzalimi). Ya rasulullah, aku akan menolong seseorang yang teraniaya, bagaimana pendapatmu jika seseorang berbuat zalim, bagaimana cara aku menolongnya? Rasulullah berkata: cegahlah ia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolong (H.R. Bukhari)*³³.

Dalam hal pemeliharaan jiwa, yang menjadi unsur *dharuriyyat* adalah terlindungnya kehidupan manusia, sehingga dia tidak mati. Ini artinya ia harus hidup karena manusia mustahil wujud tanpa hidup. Manusia juga tidak ingin sekedar hidup, tapi juga hidup jasmani dan rohani. Karena itu, faktor kesehatan menjadi unsur penting dan termasuk kebutuhan primer³⁴.

Hifdz Al-nafs dengan salah satu untuk menjaga dari ketiadaan (*hifdz Al-nafs min janib al-a'dam*) yaitu dengan cara makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Ini untuk mewujudkan supaya hak hidup tetap terjaga (*hifdz al-nafs min janib al-wujud*). Untuk menghindari dari ketiadaan, maka supaya tetap hidup, segala sesuatu yang berbentuk mentiadakan hidup tidak di perbolehkan, seperti membunuh, melukai dan merusak. Oleh karena itu Islam menerapkan hukum jinayah seperti adanya *had* dan *qishas*.³⁵

³³ Ahmad Kosasi, *Ham dalam perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Dinia, 2003, hlm. 69.

³⁴ Hamka Hak dkk, *Al-Syatibi*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007 hlm. 106.

³⁵ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-muwafaqat juz III*, Dar Al-kutub Ilmiah, hlm.20.

Dzimmi mempunyai hak untuk dilindungi atas jiwa dan hartanya, sebagaimana perlindungan terhadap harta dan kehormatan mereka, darah dan jiwa mereka dilindungi menurut kesepakatan orang muslim. Rasulullah Saw bersabda: *barang siapa ia membunuh dzimmi maka ia tidak akan mencium wanginya surga, padahal wanginya tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun*³⁶.

Beberapa diantara hak-haknya dzimmi di negara Islam yaitu, perlindungan kebebasan pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat dan terjamin kebutuhan pokoknya tanpa membedakan kelas dan kepercayaan. Tetapi musta'min tidak memiliki kebebasan politik³⁷.

2. Hak tidak Dideportasi

Seperti sudah di tuturkan di atas bahwasanya pencari suaka atau pengungsi tidak di perbolehkan untuk di kembalikan ke daerah asalnya di takutkan terancam keselamatannya, hak perlindungan diakui merupakan jiwa tradisi masyarakat Arab yang telah mengakar kuat, yang dilarang keras untuk di langgar. Pemberian bantuan perlindungan kepada yang sangat membutuhkan merupakan perilaku mulia bangsa Arab dan umat Muslim.³⁸

Hal tersebut berlaku juga bagi orang non-muslim maupun orang yang berpindah ke Islam. Sebab dalam kondisi tersebut, orang tersebut sudah memperoleh semua hak yang dimiliki orang muslim, antara lain hak perlindungan terhadap jiwanya dan keselamatan badannya, baik itu

³⁶ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hlm. 754.

³⁷ Djazuli, *op.cit*, hlm. 64.

³⁸ Ahmed Aboe El-Wafa, *op.cit*, hlm. 5.

orang muslim atau orang non-muslim maupun yang tinggal di teritori islam. Sebab dengan diberikannya perlindungan , mereka memperoleh penghormatan yang sama yang diperoleh orang muslim³⁹.

Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani memaparkan beberapa perlakuan terhadap pengungsi yaitu:

- a. Dalam kondisi apapun, seorang non-muslim tidak boleh diekstradisi ke negara asalnya, meskipun kejadian itu berada dalam konteks pertukaran tawanan yang muslim atau meskipun berimplikasi munculnya ancaman agresi militer terhadap negara islam.
- b. Kepala negara atau pemegang kekuasaan memiliki otoritas memberikan pilihan kepada orang non-muslim untuk keluar dari dari teritori negara Islam ke negara lain yang diinginkannya. Karena itu pilihan dilaksanakan adalah pilihan yang dilaksanakan adalah pilihan yang ditentukan sendiri oleh orang tersebut.
- c. Menjalankan ketentuan-ketentuan yang diadopsi sejumlah piagam perjanjian internasional modern tentang hak asasi manusia, hak-hak suaka, prinsip larangan pemulangan pengungsi yang melewati teritori negara atau ketentuan larangan ekspulsi (pengusiran) pengungsi ke suatu di mana jiwa dan kebebasannya terancam.
- d. Pemenuhan jaminan pengungsi harus diprioritaskan dibanding yang lainnya.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

- e. Tujuan adanya larangan mengekstradisi pengungsi negara asalnya ialah memberikan jaminan keselamatan fisik bagi pengungsi, dengan tidak mendatangkan kepadanya resiko kekerasan, penyiksaan atau kehilangan nyawa, karena itu merupakan hal yang tidak boleh diremehkan dalam pandangan Islam⁴⁰

3. Hak bekerja

Kaum non-muslim/dzimmi mempunyai kebebasan untuk bekerja dan berusaha dengan jenis ekonomi yang mereka inginkan. Para ahli fiqih menetapkan bahwa dzimmi dalam jual beli, transaksi, serta perdagangan mempunyai hak yang sama seperti kaum Muslim⁴¹. Orang dzimmi dan musta'min juga mempunyai hak dan kewajiban yang diantaranya tidak diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Keduanya mempunyai hak-hak sipil pada umumnya masyarakat⁴².

Hukum yang ditetapkan oleh Tuhan mengandung dua macam kewajiban, pertama mengenai keuangan, dan yang lainnya adalah ibadah. Kelompok pertama berlaku sesama manusia, sedangkan yang kedua antara manusia dengan Tuhan⁴³.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.37-39.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hlm. 764.

⁴² Djazuli, *op.cit*, hlm. 63.

⁴³ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 270.

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (Q.S.*

Al-Kahfi :46.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup⁴⁴

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan, (Al-Mulk ayat 15)*

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

Artinya: *Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Al-Isra' ayat 84)*

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha serta

⁴⁴ Ahmad Al-mursi Husain Jauhan, *op.cit.*, hlm.167.

memperoleh imbalan berupa upah dari apa yang dikerjakannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya. Pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang hendaklah yang sesuai dengan bidang keahliannya. Allah juga mengakui adanya jenis-jenis pekerjaan yang akan bekerja itu harus di tempatkan sesuai bidangn keahliannya agar ia bertanggung jawab dengan pekerjaannya itu⁴⁵.

Hadist yang mewajibkan untuk bekerja yaitu:

*Mencari mata pencaharian yang halal adalah kewajiban seperti kewajiban-kewajiban lain dalam Islam.
Tidak ada seorang pun yang makan yang lebih baik selain dari pada yang dia dapatkan dari kerja tangannya sendiri.*

Setiap orang membutuhkan kebutuhan dasar minimum untuk hidup kecukupan terkait makanan, tempat tinggal yang nyaman untuk melindungi dirinya. Sebagai seorang dewasa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain seperti orang tua. Bekerja yang baik adalah kewajiban seperti kewajiban-kewajiban lain dalam Islam⁴⁶.

Jika memberika bantuan kepada orang yang mampu, berbadan sehat dan mempunyai beberapa sumber daya sekalipun sedikit. Mungkin telah membantu memenuhi kebutuhannya yang mendesak, namun hanya menjadi obat penawar sementara⁴⁷.

⁴⁵ Kosasi Ahmad, *op.cit*, hlm.79.

⁴⁶ Abdul Wahid Hamid, *Islam Cara Hidup Alami*, Jogjakarta: Lazuardi, 2001, hlm.122.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.121.